

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 223 / Pdt.G /  
2005 / PA.Sda. TENTANG BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS R S-2009 034 AS	No REG : S-2009/AS/034 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh :

**DIAH HASTINA**

**NIM : C01304086**

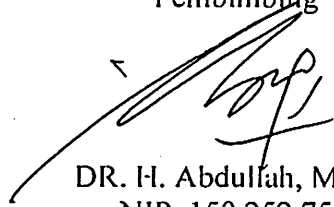
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diah Hastina NIM C01304086 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Februari 2009  
Pembimbing



DR. H. Abdullah, M.Ag.  
NIP. 150 252 755

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Diah Hastina

NIM : C01304086

Semester : IX

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Doho No.9 RT/RW: 02/01 Ds. Ketapang Kec.  
Tanggulangun Kab. Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PUTUSAN No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda. TENTANG BAGIAN WARIS  
ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Adalah asli bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyataan ini dibuat denan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2009

Pembuat Pernyataan,




*Dian Hastina*  
Dian Hastina  
NIM. C01304086

## PENGESAHAN

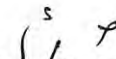
Skripsi yang ditulis oleh **Diah Hastina** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

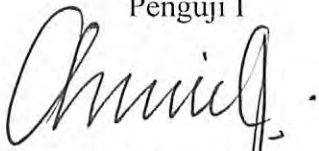
Ketua,

  
H. M. Dahlan Bishri, LC., M.Ag.  
NIP. 150 257 090


Sekretaris

  
Siti Musfiqoh, M.Ei.  
NIP. 150 377 728


Penguji I

  
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag  
NIP. 150 240 376

Penguji II

  
Drs. H. A. Imam Mawardi, MA  
NIP. 150 268 676

Pembimbing

  
DR. H. Abdullah, M.Ag  
NIP. 150 252 755

Surabaya, Maret 2009

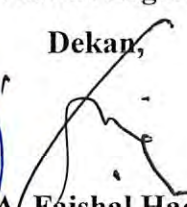
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 150 207 785







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap masalah yang dihadapi manusia pasti ada hukumnya. Baik itu wajib, sunnah, haram, mubah ataupun makruh. Disamping itu ada pula hikmah yang tersimpan dibalik semuanya. Banyak hukum – hukum terhadap suatu permasalahan sudah terjawab didalam kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun seiring dengan perkembangan sosial masyarakat moderen, maka banyak persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan baik jawaban, solusi maupun hukumnya didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara terperinci atas semua hukum dari setiap permasalahan tersebut, maka tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan bagi Ulama', dan *Ahlil Hilli wal Aqdi* (Orang-orang yang memiliki keahlian menganalisa dan memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuaannya. Dan tentunya solusi terhadap semua permasalahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Terhadap masalah-masalah yang menyangkut kewarisan, Islam telah menetapkan dengan jelas tentang hak-hak ahli waris yang harus diperoleh dari











misalnya, anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan. Apabila ada sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga yang lain. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum untuk melepaskan anak itu dari pertalian nasab keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak ke dalam keluarga orang tua angkat sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung yang akan meneruskan keturunan bapak angkatnya. Oleh karena dianggap sebagai anak kandung yang akan meneruskan keturunan, maka secara otomatis dia juga mempunyai hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan sebagai wujud dari pelaksanaan daripada persyaratan pengangkatan anak yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang mana Negara sangat memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan yang terjadi didalam pengangkatan anak itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan untuk kebaikan anak saja sehingga tidak mengherankan jika Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak-hak mereka. Termasuk didalamnya masalah kewarisan atas harta kekayaan orang tua angkatnya.









Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di Pengadilan Agama Blitar ( Studi Kasus Putusan Reg. No. 419 K/Ag./2000)” yang menjelaskan tentang Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara kewarisan anak angkat berdasarkan pertimbangan dan Alasan Hukum yang sesuai.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Hidayat pada tahun 1999 dengan “Judul Komparasi Antara KHI Dan Staatsblad 1917 No 129 Tentang Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua” yang menjelaskan tentang hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dan orang tua biologis. Harta peninggalan orang tua angkat menurut KHI dikonstruksikan dalam bentuk wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkat, sedangkan hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut BW, bahwa anak angkat berhak penuh untuk mewarisi harta orang tua angkat, dimana anak angkat tersebut sudah dianggap lahir dari pasangan suami istri yang mengangkat. Mengenai hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua biologis menurut KHI masih tetap melekat pada diri anak angkat tersebut, yaitu masih sebagai ahli waris daripada orang tua kandungnya, sedangkan menurut BW hak anak angkat gugur karena terputusnya hubungan keperdataan dengan orang tua asal.

















- Bab ketiga :** Pada bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian yang mengemukakan gambaran singkat tentang Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, konsideren dan amar putusan Hakim dalam putusan No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda.
- Bab keempat :** Membahas tinjauan hukum Islam terhadap putusan. No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda tentang bagian waris anak angkat.
- Bab kelima :** Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran.











Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturunan. Meskipun masih ada beberapa alasan lain yang menentukan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia yang secara keseluruhannya dapat disimpulkan sebagai berikut antara lain:

- 1) Adopsi dilakukan karena tidak memiliki anak sendiri.
- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- 3) Karena belas kasihan dikarenakan si anak yatim piatu.
- 4) Karena hanya memiliki anak dengan satu jenis kelamin saja, sehingga mengadopsi anak dengan jenis kelamin yang berbeda.
- 5) Sebagai "*pancingan*" bagi yang sudah lama belum memiliki keturunan agar segera memiliki anak sendiri.
- 6) Untuk menambah jumlah keluarga.
- 7) Dengan maksud agar si anak mendapatkan pendidikan yang baik.
- 8) Karena faktor kepercayaan semisal dalam rangka untuk mengambil berkah, atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun dari anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung.























































Posita merupakan kumpulan dari dasar diajukannya permohonan yang meliputi fakta hukum dan peristiwa hukum, dan secara ringkas posita dalam perkara ini antara lain : pada masa hidupnya Almarhum H. AHMAD telah menikah dengan Ibu RORO, namun tidak dikaruniai anak. Dan selama perkawinan keduanya tidak memperoleh harta gono-gini, namun Almarhum H. AHMAD yang meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2004 mempunyai harta asal (warisan) berupa: Tanah tambak seluas  $\pm$  6 Ha (enam hektar) yang terletak di Kecamatan Candi, dan sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  2.360 m<sup>2</sup> berikut dua bangunan rumah, yang satu berupa rumah warisan dan yang kedua berupa rumah bangunan baru (gono-gini) yang diberikan kepada RENI, keduanya berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Kecamatan Tanggulangin.

Sepeninggal H. AHMAD, tambak beserta tanah pekarangan dikuasai oleh Ibu RORO secara keseluruhan, namun pada tanggal 10 Oktober 2004 tambak seluas 6 Ha tersebut diambil secara paksa oleh RENI dari tangan pegagarap yang selama ini dipercaya oleh Ibu RORO. Atas tindakan tersebut Para Penggugat telah berusaha menghubungi Ibu RORO agar bersedia bermusyawarah untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN secara hukum Islam, namun Ibu RORO dan RENI keberatan dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena keduanya tidak mau membagi secara damai harta tersebut, maka jelas tindakan keduanya menimbulkan kerugian bagi para penggugat, karena apabila tanah tambak tersebut disewakan maka akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 25.000.000,- per tahunnya.



Petita merupakan beberapa tuntutan yang diajukan oleh pemohon untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan secara ringkas petita dalam permohonan ini yaitu: Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat dalam suatu persidangan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN;
3. Menyatakan tanah sengketa I dan II adalah harta asal Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN, dan para penggugat serta tergugat I berhak mewarisinya;
4. Menetapkan bagian para penggugat dan tergugat I sesuai hukum waris Islam yang berlaku;
5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya menyerahkan tanah sengketa I dan II dalam keadaan kosong kepada para penggugat untuk dilakkan pembagian waris, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka para penggugat diberikan kewenangan untuk menjual, dan hasil dari penjualannya dibagi menurut ketentuan hukum dalam putusan perkara ini;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan, atau mohon putusan seadil-adilnya.





diatasnya berdiri bangunan rumah lama dan bangunan rumah baru (gono-gini) antara almarhum H. AHMAD dan Tergugat I sebagai istrinya, yang terletak di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahwa H. AHMAD dan istrinya H. RORO (Tergugat I) mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa sebuah bangunan rumah baru dibelakang rumah lama yang ditempati oleh RENI (Tergugat II) terletak diatas tanah pekarangan (tanah sengketa II) tersebut. Karena tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka hakim menyatakan rumah tersebut adalah harta bersama H. AHMAD dan Tergugat I.

Tanah tambak dan tanah pekarangan tersebut adalah harta asal atau warisan dari orang tua H. AHMAD yang semula tambak seluas 12 Ha, lalu dibagi dengan dua saudara perempuannya (Ibu HANIM dan Ibu MAYA) dan H. AHMAD mendapat bagian  $\pm 6$  Ha. ditambah tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah lama dan sudah atas nama H. AHMAD (almarhum). Dan harta peninggalan (warisan) H. AHMAD tersebut belum pernah dibagi waris dan telah diusahakan dibagi secara damai tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan bukti (P.IX). kedua tanah sengketa tersebut yaitu tanah tambak dan tanah pekarangan adalah atas nama H. AHMAD (almarhum) berdasarkan bukti Para Penggugat ( P.V, P.VI dan P.VII) dan berdasarkan bukti-bukti tulis tersebut tidak ada indikasi dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa H. AHMAD mengalihkan, merubah dan menghibahkan tanah tambak maupun pekarangan / rumahnya tersebut kepada siapapun; hal ini dikuatkan dengan keterangan para

saksi Penggugat yang bernama : Ir. ACHWAN dan SULTHONI dihadapan sidang; berdasarkan bukti-bukti tersebut maka dalil para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa I dan tanah sengketa II telah dihibahkan oleh H. AHMAD kepada Tergugat I dan Tergugat II semasa hidupnya almarhum H. AHMAD, menurut para hakim patut diragukan dan dipertanyakan secara yuridis.

Sedangkan bukti tulis Para Tergugat (T.9) tentang surat pernyataan hibah bertentangan dengan keterangan saksi – saksi Para penggugat yang bernama : Ir. AHWAN dan SULTHONI dihadapan sidang bahwa semasa hidupnya H. AHMAD tidak pernah menghibahkan tanah tambak dan tanah pekarangan / rumahnya kepada anak angkatnya RENI, dan dalam buku Leter C Desa, tanah pekarangan dan rumah atas nama H. AHMAD seluas  $\pm 2.260 \text{ M}^2$  sejak tahun 1960 tak ada catatan perubahan pengalihan nama; Dengan demikian bukti Tulis Para Tergugat tersebut menurut para hakim patut diuji kebenarannya.

Begitu juga bukti tulis Para Tergugat (T.10) tentang surat keterangan waris yang menurut hakim bukti tersebut tidak mempunyai efek yuridis yang mengikat sebab surat tersebut dibuat sendiri secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa persetujuan dan mufakat dari ahli waris yang lain.

Hakim berpendapat bahwa seandainya hibah yang dilakukan tersebut memang benar, maka ketentuan hibah tersebut berlawanan dengan pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat mendapat bagian sebanyak-banyaknya  $1/3$  dari harta warisan orang tua angkatnya dan

juga berlawanan dengan Yurisprudensi MARI nomor : 990.K/SIP/74, tanggal 06 April 1976 yang berisi bahwa hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dan pembagian yang dilakukan dapat dibatalkan dan diadakan pembagian lagi; Dengan demikian menurut hakim, dalil dan bukti tulis Para Tergugat patut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan.

Baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak membantah, Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN semasa hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian juga anak angkatnya RENI hingga sekarang juga tetap beragama Islam, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (1) (b) Undang – Undang No. 7 tahun 1989, karena baik orang tua angkat maupun anak angkatnya tersebut tetap beragama Islam, maka hal – hal yang berkaitan dengan kewarisan antara keduanya juga dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat yang mengatakan sengketa dalam perkara ini harus diadili menurut ketentuan hukum Adat harus dikesampingkan. Oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah sengketa mal waris antara pihak – pihak yang beragama islam, maka sesuai dengan Pasal Undang – Undang No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Islam Sidoarjo.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Kuasa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan kuasa para tergugat gagal membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka hakim









2. Untuk obyek tanah pekarangan seluas  $\pm 2.360 \text{ M}^2$  mendapat bagian  $\frac{1}{3} = \frac{4}{15} \times 2.360 \text{ M}^2 = 629 \text{ M}^2$
3. untuk obyek sebuah bangunan rumah lama (rumah asal), mendapat bagian  $\frac{1}{3} = \frac{4}{15} \times$  harga rumah tersebut atau nilainya;
4. untuk obyek sebuah bangunan rumah baru (gono-gini), mendapat bagian  $\frac{1}{3} = \frac{4}{15} \times$  setengah harga rumah tersebut atau nilainya;



dalam Islam tidak akan mengakibatkan hak kewarisan, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan memberikan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup.

Dalam kasus nomor : 223/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda ini, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Almarhum H. Ahmad bin H. Maman yang berhak memperoleh bagian atas harta peninggalan dan harta gono gini atau harta bersama Almarhum, sehingga masing-masing pihak berhak mendapatkan bagian sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan terhadap anak angkat, hakim memutuskan memberikan bagian sebagai berikut:

1. Untuk obyek tanah tambak seluas  $\pm 6$  Ha. ( $60.000 \text{ M}^2$ ) mendapat bagian  $1/3 = 4/15 \times 60.000 \text{ M}^2 = 16.000 \text{ M}^2$  ;
2. Untuk obyek tanah pekarangan seluas  $\pm 2.360 \text{ M}^2$  mendapat bagian  $1/3 = 4/15 \times 2.360 \text{ M}^2 = 629 \text{ M}^2$
3. Untuk obyek sebuah bangunan rumah lama (rumah asal) mendapat bagian  $1/3 = 4/15 \times$  harga rumah tersebut atau nilainya; dan
4. Untuk obyek sebuah bangunan rumah baru (gono-gini) mendapat bagian  $1/3 = 4/15 \times$  harga rumah tersebut atau nilainya.

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan bagian waris kepada anak angkat sebagai tergugat II adalah berdasarkan:



















